

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA DI KOTA TANGERANG**

Mala Nurwita, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Air pollution control is an effort to prevent, overcome and restore air quality. Air pollution control efforts are carried out by the central government, local governments and those in charge of businesses. The purpose of this research is to describe the efforts of the Tangerang City Environmental Service in Controlling Air Pollution and to identify the Inhibiting and Encouraging Factors of Tangerang City Environmental Service in Controlling Air Pollution. This research uses descriptive qualitative research methods. The data collection technique is done by interview, observation and documentation related to the research. The results showed that the efforts of Tangerang City Environmental Service in controlling air pollution have not been effective. The inhibiting factor for Tangerang City Environmental Service in controlling air pollution is environmental characteristics. The driving factors for Tangerang City Environmental Service in controlling air pollution are managerial policies and practices. Recommendations that can be made to increase the success of Tangerang City Environmental Service in controlling air pollution are increasing socialization to the public in controlling air pollution and increasing the budget allocation for Tangerang City Environmental Service regarding efforts to control air pollution.

Key Words: Effort, Effectiveness, Organization, Controlling, Air Pollution

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Beberapa aktivitas manusia yang tidak memperhatikan lingkungan hidup akan menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, kebisingan, kebauan dan lain sebagainya.

Permasalahan mengenai pencemaran udara diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dalam berbagai sektor, salah satunya di Provinsi Banten. Kondisi pencemaran udara pada Tahun 2016 di Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang masih berada di bawah baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Lebak kondisi pencemaran udara tidak melebihi baku mutu udara ambien. Sementara, di Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang terdapat pencemaran udara yang melebihi baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Sumber pencemaran udara Kota Pandeglang berasal dari kegiatan sektor industri. Sementara, di Kota Tangerang pencemaran udara bersumber dari kegiatan sektor industri dan transportasi.

Keberadaan sektor industri dan sektor transportasi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak terkontrol dengan baik serta tidak diimbangi dengan kondisi lingkungan akan berdampak pada menurunnya kondisi kualitas lingkungan hidup atau menimbulkan pencemaran udara.

Pada tahun 2015, indeks pencemaran udara di Kota Tangerang mencapai 76,6 point. Pada tahun 2016, mengalami penurunan pencemaran sebesar 1,7%. Pencemaran udara dengan indeks tertinggi pada tahun 2018 mencapai 95,76 point. Indeks pencemaran udara di Kota Tangerang masih berada di rentang 50 -100, artinya pencemaran udara berada pada kategori Sedang. Akan tetapi, perlu diwaspadai karena dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar apabila tidak ada pengendalian yang baik dari pemerintah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, pada Pasal 13 menyatakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lebih lanjut, upaya pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Atas dasar Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup Kota

Tangerang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang lingkungan hidup. Dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang. Dari beberapa informasi yang diperoleh, terdapat kendala DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

Kedua, terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab organisasi dilihat dari pelaksanaan tugas organisasi menghadapi permasalahan dalam pekerjaannya. Berdasarkan buku SLHD Provinsi Banten Tahun 2017, kurang optimalnya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dilihat dari belum seluruhnya sektor kegiatan/usaha baik pemerintah maupun swasta yang potensial menimbulkan pencemaran udara berhasil di data oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Masih terdapat industri yang menghasilkan pencemaran udara di Kota Tangerang dan seringkali tidak diketahui oleh pegawai DLH Kota Tangerang.

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam terkait keberhasilan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Tangerang. Untuk itu, penelitian ini berjudul “Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian

Pencemaran Udara di Kota Tangerang”.

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Tangerang.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Tangerang.

C. Kajian Teori

Administrasi Publik

Keban (2014: 3) menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang memiliki tujuan dalam memecahkan permasalahan publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama pada bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Menurut Henry (dalam Keban, 2014: 6) memberikan batasan bahwa administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik.

Mengacu pada teori di atas, administrasi publik dapat disimpulkan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengkoordinasikan sumberdaya dan personel publik agar dapat mengelola sumber daya yang ada guna mencapai suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan publik.

Manajemen Publik

Overman (dalam Keban, 2014: 58), menyatakan manajemen publik bukan

“*scientific management*” walaupun sangat erat kaitannya. Manajemen publik tidaklah “*policy analysis*”, bukan juga “administrasi publik baru” atau kerangka yang lebih baru, akan tetapi manajemen publik merefleksikan tekanan antara *rational-instrumental* pada satu pihak serta orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu interdisipliner dari aspek umum organisasi dan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, dan controlling* di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik informasi dan politik di sisi lain.

Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, manajemen publik adalah suatu proses yang menggerakkan sumberdaya manusia dan non manusia sesuai apa yang diperintahkan kebijakan publik.

Efektivitas Oeganisasi

Richard M. Steers (1985: 6) berpandangan bahwa efektivitas organisasi ialah ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Emitai Etzioni (1982: 54) menyatakan efektivitas organisasi, yaitu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan. dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi diartikan kemampuan organisasi mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan. Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan suatu organisasi, Steers (1985: 5–7)

mengemukakan 3 (tiga) model dalam menilai efektivitas organisasi, yaitu:

1. Optimasi tujuan
Penggunaan model optimasi tujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula.
2. Perspektif Sistem
Penggunaan model perspektif sistem ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.
3. Tekanan Pada Perilaku
Penggunaan model tekanan pada perilaku ini melihat efektivitas organisasi dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi.

Menurut Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2010: 187) mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya “*System Model*” mencakup 4 kriteria, yaitu:

1. Adaptasi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal.
2. Integrasi, yaitu tingkat kemampuan suatu organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus serta komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Motivasi Anggota, yaitu keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Menurut Steers (1985) mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu:

1. Karakteristik organisasi
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi karakteristik organisasi di antaranya, yaitu:
 - a. Desentralisasi
Desentralisasi adalah sebuah batasan kekuasaan dan kewenangan dari atas ke bawah dalam suatu hierarki organisasi. Desentralisasi erat kaitannya dengan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.
 - b. Spesialisasi
Spesialisasi merupakan upaya suatu organisasi yang berkaitan dengan pembagian fungsi kerja menjadi kegiatan yang sangat khusus. Spesialisasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi karena setiap pekerja dituntut mempunyai keahlian dibidang tertentu sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjalankan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

- c. Formalisasi
Formalisasi merupakan suatu batas penentuan atau pengaturan bagi para pegawai dalam melakukan kegiatan. Formalisasi dapat ditunjukkan melalui peraturan yang resmi atau berupa prosedur bagi pegawai melaksanakan kegiatan. Semakin besar pengaruh peraturan atau kewajiban yang mengatur tingkah laku pekerja maka semakin besar tingkat formalitasnya.
- d. Rentang kendali
Rentang kendali berkaitan dengan jumlah rata-rata bawahan dari tiap penyelia. Rentang kendali juga berkaitan dengan kemampuan seorang penyelia untuk melakukan koordinasi dengan pekerja secara efektif.
- e. Besarnya ukuran organisasi
Besarnya organisasi berhubungan positif dengan peningkatan efisiensi organisasi. Beberapa aspek seperti pergantian pemimpin, berkurangnya biaya dan tenaga kerja, dan pengendalian lingkungan dianggap sebagai beberapa aspek yang mengatur pelaksanaan efisiensi pekerjaan.
- f. Besarnya Unit Kerja
Besarnya ukuran suatu unit kerja berlainan pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku para pekerja sehingga mempengaruhi efektivitas organisasi. Bagi para pekerja, besarnya unit kerja selalu berkaitan dengan berkurangnya kepuasan kerja para pegawai, tingkat kehadiran serta berpeluang menimbulkan konflik antar pegawai.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan, yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern lebih dikenal dengan iklim organisasi meliputi atribut lingkungan kerja, sedangkan lingkungan ekstern berasal dari luar batas organisasi serta mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi. Terdapat tiga dimensi utama dalam menentukan lingkungan eksternal meliputi ketidakpastian, kestabilan serta kekompleksan.

3. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja meliputi perbedaan individu dan perilaku individu yang penting artinya bagi pemahaman keberhasilan organisasi sehingga penting artinya bagi organisasi untuk mengetahui tujuan individu dalam organisasi serta mengetahui harapan individu sebagai imbalan terhadap tujuan organisasi. Faktor ini meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi pekerja. Keterikatan pada suatu organisasi meliputi ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen, sedangkan prestasi kerja meliputi kemampuan, kejelasan peran dan motivasi.

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen.

Terdapat 6 (enam) bidang manajemen yang meningkatkan efektivitas, antara lain sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan Strategis

Proses manajerial harus sanggup dalam menentukan dengan jelas tujuan strategis dan sasaran yang akan dicapai suatu organisasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi

efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

b. Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya

Pencarian dan pemanfaatan sumber daya, berkaitan dengan peran manajerial dalam pencarian dan pemanfaatan sumber daya, terdapat 3 bidang yang saling berhubungan. Pertama, yaitu keharusan manajer dalam mengintegrasikan subsistem yang terdapat dalam organisasi. Kedua, proses penetapan dalam pedoman kebijakan. Ketiga, rancangan sistem yang dapat mengawasi, mengevaluasi, memonitor selama kegiatan berlangsung.

c. Proses Komunikasi

Proses komunikasi berperan sentral menentukan efektivitas suatu organisasi. Proses dan pola dalam komunikasi adalah sarana untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan pekerja melakukan kegiatan ke arah tujuan dan sasaran suatu organisasi.

d. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan mengisi beberapa fungsi penting yang diperlukan bagi efektivitas organisasi. Fungsi kepemimpinan dapat mengisi kekosongan desain dan struktur organisasi, kepemimpinan juga dapat menjaga stabilitas organisasi dan memungkinkan organisasi mengalami perubahan.

e. Inovasi Organisasi

Suatu organisasi perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang selalu

berubah. Dalam kenyataannya, adaptasi dan inovasi sering dicap sebagai efektivitas itu sendiri.

Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara adalah kegiatan yang berupaya mengembalikan baku mutu udara sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Penetapan baku mutu udara menjadi tolak ukur dalam melakukan pengendalian pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk melestarikan kondisi lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pengendalian pencemaran meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara. Pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

D. Metodologi Penelitian

1) Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

2) Situs Penelitian

Lokus pada penelitian ini adalah organisasi publik yang ada di Kota Tangerang yang memiliki tugas dalam bidang lingkungan hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

3) Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, informan penelitian dipilih secara *snowball* dengan bantuan *key* informan. Informan awal pada penelitian ini adalah Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran DLH Kota Tangerang. Apabila informasi yang didapatkan masih kurang mendalam maka dalam menentukan informan selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik *snowball sampling*. Penentuan informan akan dihentikan apabila datanya telah jenuh (informan tidak lagi memberikan informasi baru yang berarti).

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi perkataan dan tindakan, sumber data tertulis, foto, serta statistik dan data angka.

5) Sumber Data

1. Data Primer.

Data primer ialah informasi yang cara memperolehnya langsung dari sumber awal di lokasi penelitian ataupun objek penelitian.

2. Data Sekunder.

Data sekunder ialah informasi yang metode memperolehnya dilakukan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

6) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

7) Analisa Data

Analisis data atau informasi yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

8) Kualitas Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Menurut Sugiyono (2013: 373), triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara dilihat melalui 4 (empat) kriteria efektivitas organisasi, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi anggota dan produksi.

1. Adaptasi

Penetapan program/kegiatan DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara selalu mengikuti perubahan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan program/kegiatan DLH Kota Tangerang yang dapat berubah selama 5 tahun sekali sesuai yang tercantum pada Rencana Strategis DLH Kota Tangerang yang mengacu pada RPJMD Kota Tangerang.

Upaya peningkatan kapasitas organisasi dilakukan DLH Kota Tangerang dengan memberikan pengembangan pengetahuan dan pelatihan kepada para pegawai DLH Kota Tangerang. DLH Kota Tangerang memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun daerah melalui BKPSDM dan DLH Kota Tangerang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di lingkungan organisasi.

2. Integrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, DLH Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi/non institusi. Beberapa program sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri, yaitu sosialisasi *eco driving*, sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup, dan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum lingkungan hidup.

DLH Kota Tangerang juga melibatkan beberapa OPD untuk melaksanakan program/kegiatan pengendalian pencemaran udara. Keterlibatan OPD tersebut, antara lain Dinas Perhubungan Kota Tangerang dalam melaksanakan program uji emisi gratis, Kepolisian Kota Tangerang dalam pelaksanaan program uji emisi gratis dan program *car free day*, serta Dinas Perindustrian Kota Tangerang dalam memberikan penerbitan izin lingkungan dan izin usaha kepada

pelaku industri di Kota Tangerang. DLH Kota Tangerang juga melibatkan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Upaya keterlibatan masyarakat, yaitu dilakukan melalui penciptaan program kampung iklim dan sekolah adiwiyata untuk mengubah perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa DLH Kota Tangerang mampu mengadakan sosialisasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pengendalian pencemaran udara serta melibatkan beberapa pihak lainnya dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

3. Motivasi Anggota

Hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara dikatakan belum optimal. Kurangnya alat pemantauan pencemaran yang belum mewakili seluruh sektor di wilayah Kota Tangerang dan kurang optimalnya fasilitas *database* pemantauan dalam pencemaran udara. DLH Kota Tangerang juga belum memiliki peralatan sampling serta kurangnya ketersediaan mobil operasional dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, DLH Kota Tangerang dapat dikatakan belum efektif dalam pengendalian pencemaran udara.

4. Produksi

Upaya DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara, yaitu: Pertama, program pengawasan

institusi/non institusi. Program pengawasan institusi/non institusi merupakan upaya pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak. Program pengawasan ini merupakan program yang mulai diterapkan oleh Seksi Bidang Pengendalian Pencemaran DLH Kota Tangerang pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, DLH Kota Tangerang telah melakukan pengawasan institusi/non institusi sesuai target yang ditentukan.

Kedua, program *fun rally eco driving*. Program ini merupakan upaya DLH Kota Tangerang dalam penanganan pencemaran udara dari sumber bergerak. Kegiatan ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Tangerang melalui DLH Kota Tangerang dengan tujuan mensosialisaikan teknik atau cara mengemudi yang tepat sehingga dapat menghemat bahan bakar dengan baik. Program ini merupakan upaya DLH Kota Tangerang untuk menurunkan emisi pencemaran udara di Kota Tangerang dari sektor transportasi. Kelompok sasaran dari program ini, yaitu seluruh warga di wilayah Kota Tangerang.

Ketiga, program *car free day* atau hari bebas kendaraan. Program ini merupakan upaya DLH Kota Tangerang dalam penanganan pencemaran udara dari sumber bergerak. Program tersebut dilakukan DLH Kota Tangerang dengan sasaran masyarakat Kota Tangerang. Program hari bebas kendaraan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam seminggu.

Program *Car Free Day* dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kota Tangerang, yaitu Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Neglasari.

Keempat, program penanaman 1.000 pohon. Program tersebut dilakukan dalam upaya pemulihan mutu udara di Kota Tangerang. Pada program ini, Pemerintah Kota Tangerang melalui DLH Kota Tangerang menargetkan 1.000 pohon tertanam di wilayah Kota Tangerang setiap tahunnya. DLH Kota Tangerang bertanggung jawab dalam menyediakan bibit tanaman jika terdapat permintaan dari masyarakat atau berbagai pihak terkait program penanaman pohon di Kota Tangerang.

Kelima, program uji emisi gratis. Program ini merupakan upaya DLH Kota Tangerang dalam penanganan pencemaran udara dari sumber bergerak. Bentuk dari program ini, yaitu dilakukan uji emisi bagi kendaraan pribadi secara gratis kepada masyarakat di Kota Tangerang. Program ini dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi setiap satu tahun sekali.

Terdapat beberapa kendala pada pelaksanaan program uji emisi gratis, yaitu kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan program. Kendala lainnya, yaitu karena tidak adanya payung hukum berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran sehingga beberapa masyarakat yang tidak lulus uji emisi

tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas. Upaya yang dilakukan oleh DLH Kota Tangerang hanya menghimbau kepada masyarakat untuk memperbaiki atau merawat kendaraannya.

2. Faktor penghambat dan faktor pendorong DLH Kota Tangerang dalam Pengendalian Pencemaran Udara

1) Karakteristik Organisasi

Salah satu aspek karakteristik organisasi yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu pembagian tugas antara masing-masing bidang dalam organisasi DLH Kota Tangerang. Pembagian tugas dan kewenangan organisasi DLH Kota Tangerang sudah mengacu pada Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2016.

Upaya spesialisasi kerja yang telah dilakukan oleh DLH Kota Tangerang. Hasil wawancara dengan informan, penempatan tugas para pegawai DLH Kota Tangerang dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian pegawai. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong efektivitas upaya DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara.

2) Karakteristik Lingkungan

Kondisi lingkungan internal DLH Kota Tangerang dapat dikatakan dapat terbuka dengan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan sarana untuk memberikan kritik dan saran terhadap organisasi sehingga organisasi DLH Kota Tangerang dapat tanggap dalam menghadapi permasalahan

lingkungan. Aplikasi tersebut, yaitu *TangerangLive*. Selain melalui aplikasi *TangerangLive*, penerimaan kritik dan saran organisasi DLH Kota Tangerang juga dapat dilakukan secara langsung ke kantor DLH Kota Tangerang. Adanya keterbukaan organisasi mempengaruhi organisasi tanggap menghadapi perubahan lingkungan di sekeliling organisasi.

DLH Kota Tangerang merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. DLH Kota Tangerang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dalam Bidang Lingkungan Hidup di Kota Tangerang. Anggaran dana dalam upaya pengendalian pencemaran udara menjadi kendala DLH Kota Tangerang yang menyebabkan ketersediaan sarana dan prasana DLH Kota Tangerang belum optimal. Hal tersebut dapat menghambat DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

Lingkungan eksternal DLH Kota Tangerang dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang berada di luar kemampuan organisasi serta mempengaruhi setiap pengambilan keputusan organisasi. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara, yaitu kondisi budaya masyarakat Kota Tangerang itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam pengendalian pencemaran udara, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Hal

tersebut dapat dilihat dari *respond* dari masyarakat untuk mengikuti program dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan perilaku masyarakat yang masih menimbulkan pencemaran udara. Jumlah kendaraan yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan kondisi luas jalan maka akan menimbulkan kemacetan. Hal tersebut dapat menjadi penyumbang sumber pencemaran udara dari sektor bergerak/transportasi. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran masyarakat dapat menjadi faktor yang menghambat organisasi DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

3) Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja DLH Kota Tangerang dalam hal ini, yaitu terdapat keahlian khusus bagi pegawai untuk melaksanakan program pengendalian pencemaran lingkungan. Para pegawai tersebut, yaitu petugas PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup). Para PPLH tersebut memiliki keahlian khusus untuk mengawasi kondisi lingkungan hidup di Kota Tangerang.

4) Kebijakan dan Praktek Manajerial

Proses penyusunan tujuan strategis DLH Kota Tangerang tercantum dalam Rencana Strategis DLH Kota Tangerang mengacu pada RPJMD Kota Tangerang, sedangkan Program kerja DLH Kota Tangerang tercantum pada dokumen Rencana Kerja DLH Kota Tangerang. Dalam setiap proses penyusunannya melibatkan peran serta pegawai dan masyarakat untuk menjaring aspirasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas organisasi

DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara karena proses penetapan tujuan organisasi dilakukan sesuai tuntutan perubahan yang ada disekeliling organisasi.

Inovasi yang dilakukan DLH Kota Tangerang berupa program sosialisasi pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat melalui program *eco driving* dan penerapan sistem informasi melalui aplikasi monikur (monitoring kualitas udara). Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Tangerang dapat dikatakan belum efektif. Faktor penghambat DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara, yaitu karakteristik lingkungan DLH Kota Tangerang. Karakteristik lingkungan internal DLH Kota Tangerang yang menjadi penghambat, yaitu minimnya alokasi anggaran dalam upaya pengendalian pencemaran. Karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara, yaitu kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan program pengendalian.

Faktor pendorong DLH Kota Tangerang dalam upaya pengendalian pencemaran udara, yaitu kebijakan dan praktek manajerial DLH Kota

Tangerang. Inovasi dilakukan DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara, yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui program *eco driving* atau tata cara berkendara dengan baik serta penerapan aplikasi monikur (monitoring kualitas udara).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, untuk dapat meningkatkan keberhasilan upaya DLH Kota Tangerang dalam pengendalian pencemaran udara maka penulis menyarankan:

1. DLH Kota Tangerang meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum dan sektor swasta mengenai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan mutu udara. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
2. DLH Kota Tangerang meningkatkan alokasi anggaran dana dalam upaya pengendalian pencemaran udara untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran udara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

DLH Kota Tangerang. (2019). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023*. Kota Tangerang.

- DLH Kota Tangerang. (2018). *Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Kota Tangerang Tahun 2018*. Kota Tangerang.
- DLHK Provinsi Banten. (2017). *Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2017*. Provinsi Banten.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah, upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- Soemarwoto, O. (2018). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Strees, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Thoha, M. (2014). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jurnal dan Skripsi**
- Astuti, W., & Kusumawardani, Y. (2018). Analisis Pencemaran Udara Dengan Box Model (Daya Tampung Beban Pencemar Udara) Studi Kasus Di Kota Tangerang. *Neo Teknika*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.37760/neoteknika.v3i1.1048>
- Deshermansyah. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara DKI Jakarta. *IJEEM: Indonesian Journal of Environmental and Management*, 1, 1–21.
- Hartining, D. (2016). *Efektivitas Pengawasan BLH Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara oleh Perusahaan di Kota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Irawan, D. (2107). *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya*. *Journal Unair*. 5(3).

Internet

Manggalani, R. U. (2020). *Pemkot Tangerang Gelar Uji Emisi Gratis, Bila Tak Lulus Mesti Ke....*
Diambil dari
<https://www.suara.com/otomotif/2019/09/18/130000/pemkot-tangerang-gelar-uji-emisi-gratis-bila-tak-lulus-mesti-ke>

Landasan Hukum

Undang-Undang No. 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
1999 tentang Baku Mutu Udara
Ambien

Peraturan Daerah Kota Tangerang No.
8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah

Website

Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang
(<https://dislh.tangerangkota.go.id>
/ diakses pada Tanggal 19 April
2020)

BPS Provinsi Banten
(<https://banten.bps.go.id/> diakses
pada Tanggal 19 April 2020)

BPS Kota Tangerang
(<https://tangerangkota.bps.go.id/>
diakses pada Tanggal 19 April 2020)